

DPR DAN TRANSFORMASI PARTISIPASI GENERASI Z: IMPELMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Kaharuddin *¹

Patricia Parsaulian ²

Belva Sulaikha Ivana ³

Agnes Graciella Rich Simbolon ⁴

Eric Christoper Demetrius Sarumaha ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Indonesia

*e-mail : kaharuddin@upnvj.ac.id ¹, 2510611052@mahasiswa.upnvj.ac.id ²,
2510611053@mahasiswa.upnvj.ac.id ³, 2510611063@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴,
2510611069@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁵

Abstrak

Demokrasi dapat tercipta jika terdapat keseimbangan antara tugas dan peran DPR beserta generasi z dalam menciptakan kedaulatan pada suatu negara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana partisipasi generasi z dalam ikut andil mengambil sebuah peran dalam menyuarakan hak maupun pendapat sebagai salah satu nilai dari keberlangsungan demokrasi, serta menjelaskan dampak yang diberikan generasi z dalam mencapai kedaulatan dengan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan literature riview, dengan menganalisis partisipasi generasi Z serta implementasi kedaulatan rakyat oleh DPR dalam sistem demokrasi Indonesia. Generasi z memiliki peran yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan dalam sistem demokrasi di Indonesia, melalui langkah ini dapat menjadi sebuah masukan dan refleksi terhadap DPR untuk membuka ruang partisipasi generasi z dalam menciptakan kehidupan yang berlandaskan demokrasi. Indonesia membutuhkan generasi z dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, melalui adanya inovasi yang melibatkan penggunaan teknologi dapat menjadi langkah bijak untuk mendorong kemajuan demokrasi modern yang berkelanjutan

Kata kunci: Demokrasi, Generasi Z, DPR, Kedaulatan, Partisipasi

Abstract

Democracy can be created if there is a balance between the duties and roles of the House of Representatives and Generation Z in creating sovereignty in a country. This study aims to examine how Generation Z participates in taking on a role in voicing their rights and opinions as one of the values of sustainable democracy, as well as explaining the impact of Generation Z in achieving sovereignty based on democratic values. The method used is a qualitative approach with descriptive-analytical and literature review methods, analyzing Generation Z's participation and the implementation of people's sovereignty by the DPR in Indonesia's democratic system. Generation Z has a very important role in upholding sovereignty in Indonesia's democratic system. This step can serve as input and reflection for the DPR to open up space for Generation Z participation in creating a life based on democracy. Indonesia needs Generation Z to strengthen its democratic system. The use of technology-driven innovation can be a wise step to promote the advancement of sustainable modern democracy.

Keywords: Democracy, Generation Z, DPR, sovereignty, Participation

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

DPR adalah salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip tersebut melalui pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang bertujuan untuk menjamin kehidupan demokratis serta mewakili aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Sebagai lembaga perwakilan, DPR diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi formal

konstitusional, tetapi juga menjadi wadah penyambung suara rakyat yang mampu merespons dinamika sosial politik masyarakat yang terus berkembang.

Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara fungsi representatif DPR dan ekspektasi publik, seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR, rendahnya tingkat partisipasi publik dalam proses legislasi, serta keterbatasan akses bagi kelompok muda, khususnya generasi Z, dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir dan tumbuh di era digital, sehingga memiliki karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya— mereka lebih kritis terhadap isu sosial, cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai partisipatif dan transparansi. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 90% generasi muda Indonesia aktif menggunakan media sosial sebagai ruang berekspresi, berdiskusi, dan menyuarakan aspirasi politik. Temuan serupa juga diperkuat oleh penelitian Pusat Kajian Kepemudaan Universitas Indonesia (PKK UI), yang menyebutkan bahwa generasi Z memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi digital (*e-democracy*) melalui keterlibatan aktif di ruang publik daring.

Keterlibatan generasi Z sebagai bagian dari mayoritas penduduk Indonesia menjadi faktor strategis dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat. Generasi ini tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki daya kritis, akses terhadap teknologi informasi, serta keberanian dalam menyampaikan aspirasi. Kehadiran mereka berpotensi memperkuat fungsi representasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga tercipta hubungan timbal balik antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Selain itu, dalam kajian Ilmu Negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu organ penting negara yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Fungsi-fungsi tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi tulang punggung demokrasi di masa mendatang. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap rakyat serta keterlibatan generasi z penting dilakukan sebagai wujud penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara fungsi representatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan harapan masyarakat.

Kritik yang muncul sering kali berkaitan dengan kurang optimalnya penyerapan aspirasi, rendahnya tingkat kepercayaan publik, serta terbatasnya keterlibatan generasi muda dalam proses legislasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar berperan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan bagaimana generasi Z dapat ikut serta memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam perspektif Ilmu Negara, legitimasi suatu lembaga negara bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai representasi rakyat, harus mampu membangun kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak terjadi krisis legitimasi.

Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk menegaskan kembali perannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat melalui kerja sama antara fungsi representatif dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi Z.

Keterlibatan aktif generasi Z dalam dinamika demokrasi, baik melalui partisipasi politik secara langsung maupun melalui ruang digital, mencerminkan manifestasi konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di era modern yang semakin terhubung secara teknologi. Dengan memperhatikan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menelaah bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan transformasi kelembagaan dalam menghadapi tantangan representasi politik generasi Z yang dinamis, serta bagaimana pola partisipasi generasi Z tersebut mampu berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan *literature riview*. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transformasi partisipasi generasi Z serta implementasi kedaulatan rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta relasi sosial yang terjadi di antara aktor-aktor demokrasi dalam konteks digital dan partisipatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Secara normatif, penelitian menelaah dasar hukum dan konstitusional terkait pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait fungsi dan peran DPR. Sementara secara empiris, penelitian ini berfokus pada realitas sosial dan politik yang menggambarkan bagaimana generasi Z berpartisipasi dalam sistem demokrasi melalui ruang digital dan interaksi dengan lembaga DPR.

Di samping itu dalam penelitian ini menggunakan metode *literature riview*, yang berfokus pada pengumpulan data, evaluasi, dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan ini dapat memudahkan dalam memahami, mengidentifikasi, dan menyediakan landasan teori yang kuat untuk penelitian baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia kekuasaan tertinggi terdapat di tangan rakyat, sesuai yang tertera di UUD 1945. Tetapi, sekarang prinsip ini sulit untuk diterapkan karena adanya perubahan sosial dan teknologi digital. Generasi Z, yang lahir dan besar di dunia digital, mempunyai peran penting dalam demokrasi.

Gen Z memiliki potensi besar dalam menunjukan arah kebijakan politik negara. Tetapi, DPR sepertinya belum sepenuhnya memahami teknologi digital biar bisa mendengarkan aspirasi Gen Z dan mempererat komunikasi politik. Maka dari itu DPR perlu merubah cara pikir serta menunjukan jika mereka adalah wakil rakyat yang peduli terhadap rakyat dan menanggapi partisipasi politik digital dari Gen Z.

Melihat situasi ini, penelitian ini mengungkapkan bahwa Generasi Z bukan hanya sekadar kelompok pengguna media sosial, tetapi telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan politik terpenting di Indonesia. Dengan jumlah suara yang mencapai puluhan juta, Gen Z memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah demokrasi, terutama melalui aktivitas digital yang semakin kritis, kreatif, dan transparan. Mereka tidak hanya mengevaluasi kebijakan, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik, mengawasi pemerintah, serta mendesak lembaga negara agar lebih transparan dan bertanggung jawab.

Namun, masih ada kesenjangan komunikasi antara DPR dan generasi muda. DPR cenderung menggunakan gaya komunikasi formal, sedangkan Gen Z bergerak cepat dalam ruang digital yang dinamis. Akibatnya, partisipasi mereka dalam proses legislasi kurang maksimal. Sebenarnya, jika DPR dapat beradaptasi—misalnya dengan memanfaatkan platform digital, mengadakan forum interaktif, atau bekerja sama dengan influencer politik—hubungan antara lembaga legislatif dan kaum muda dapat menjadi lebih kuat.

Dengan mengenali kebutuhan, karakter, dan cara berkomunikasi Gen Z, DPR dapat menciptakan peluang untuk demokrasi yang lebih modern dan inklusif. Generasi Z sendiri memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui kekuatan digital yang mereka miliki. Oleh karena itu, kolaborasi antara Gen Z dan DPR menjadi kunci untuk menciptakan proses politik yang tidak hanya formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat di era digital.

Oleh karena itu, studi ini diharapkan berfungsi sebagai pengingat bahwa masa depan demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh seberapa baik lembaga-lembaga negara dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Generasi Z bukan hanya sasaran kebijakan, melainkan juga entitas penting yang perlu dilibatkan dalam proses politik. Dengan menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka, memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, dan menghargai keinginan generasi muda, DPR dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kuat serta menciptakan sistem demokrasi yang benar-benar partisipatif dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

HASIL PENELITIAN

a. Generasi Z dan Kekuatan Digital dalam Politik

Anak-anak Gen Z dan Milenial berjumlah sekitar 46,8 juta suara di Pemilu 2024. Mereka bisa menentukan arah politik Indonesia. Menurut Gen Z, media sosial seperti TikTok, X, dan Instagram bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk membicarakan politik dan menyampaikan pendapat mengenai kebijakan. Tetapi, DPR sepertinya belum memahami cara beradaptasi di dunia digital. Sedangkan, platform seperti e-aspirasi atau rapat secara live dapat digunakan untuk menarik perhatian Gen Z. Jika DPR dapat memanfaatkan platform digital seperti itu, maka DPR akan lebih mudah menyampaikan informasi ke dalam lingkup masyarakat

b. Gen Z Memiliki Pandangan Politik Yang Berbeda

Gen Z mempunyai pandangan politik mereka sendiri. Mereka lebih kritis terhadap lembaga-lembaga formal, ingin semua transparan dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Gen Z, penting pemimpin mempunyai integritas, tidak hanya dari nama partai. Gen Z juga sering membuat kampanye yang menyenangkan dan terbuka lewat media sosial, sembari mengawasi kebijakan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan jika sekarang politik lebih dari nilai-nilai dan informasi, tidak hanya kepemimpinan.

c. Sulitnya Berkomunikasi dan Kurangnya Partisipasi

Meskipun pintar dalam bermain di dunia digital, Gen Z cenderung sulit untuk berbicara dengan lembaga politik seperti DPR. Karena, gaya komunikasi mereka yang berbeda. DPR sangat formal, sementara Gen Z lebih santai dan ingin cepat di sosial media. Alhasil, mereka menjadi kurang berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini dapat diubah jika DPR mau mencoba untuk menggunakan media sosial resmi, seperti membuat forum digital yang menyenangkan, atau bekerja sama dengan influencer politik agar anak muda dapat tertarik dan ingin terlibat

d. Kesejahteraan Rakyat di Era Digital

Di negara demokrasi seperti Indonesia, rakyat mempunyai kekuasaan untuk mengawasi dan ikut memprotes kebijakan. Dalam hal itu, dengan adanya Gen Z yang pintar didalam dunia digital, Gen Z mempunyai kesempatan besar untuk membuat kesejahteraan rakyat ini semakin terlihat. DPR harus menunjukkan kalau mereka adalah wakil rakyat dengan membuat banyak cara yang sesuai dengan perkembangan jaman. Maka dari itu, demokrasi di Indonesia bukan hanya sekedar proses, tetapi benar-benar menunjukkan apa yang para rakyat inginkan, terutama bagi para Gen Z.

HASIL PEMBAHASAN

a. DPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi vital sebagai penggambaran dari kedaulatan rakyat melalui aktifitas representatif. Namun, performa ini belum maksimal karena masih terdapat kesenjangan antara anggota dewan dan masyarakat. Dalam perspektif Ilmu Negara, keabsahan lembaga negara ditentukan oleh kesanggupannya untuk mencerminkan keinginan rakyat. Ketidakcocokan dalam representasi oleh DPR menandakan perlunya pergeseran dari representasi yang formal menuju substantif. Dalam hal ini, rakyat harus diakui tidak hanya sebagai objek kebijakan tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam proses pembentukannya.

b. Transformasi Partisipasi Politik Generasi Z

Generasi Z, yang merupakan kelompok digital-native, memperkenalkan cara baru dalam berpartisipasi politik. Mereka tidak terbatas pada metode partisipasi yang tradisional, tetapi lebih aktif di platform media sosial, gerakan online, dan wilayah publik berbasis digital. Perubahan ini menunjukkan perkembangan demokrasi yang mengarah pada partisipasi yang lebih luas dan terbuka. Dalam konteks teori demokrasi deliberatif, ruang digital menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk berdiskusi, memberikan kritik, dan mengekspresikan kepentingan publik

tanpa batasan fisik. Oleh sebab itu, DPR perlu mengubah strategi komunikasinya agar lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi pada generasi Z.

c. Sinergi DPR dan Generasi Z dalam Penguatan Demokrasi

Keterlibatan generasi Z membuka kesempatan bagi DPR untuk membangun demokrasi yang lebih bermakna. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan saluran digital yang dimiliki DPR, seperti situs web untuk aspirasi publik, kegiatan dengar pendapat terbuka secara online, hingga penerbitan yang transparan mengenai proses legislasi. Dengan melibatkan kalangan muda, DPR bisa meningkatkan legitimasi di mata publik serta memperdalam pemahaman politik masyarakat tentang fungsi lembaga legislatif. Kolaborasi ini juga berpotensi untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.

d. Tantangan dan Arah Perubahan Demokrasi Indonesia

Walaupun ada banyak peluang untuk kolaborasi, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pemahaman politik digital, penyebaran berita bohong, dan sikap apatis dari sebagian generasi muda terhadap institusi politik resmi. Oleh karena itu, DPR perlu memperkuat program pendidikan politik bagi masyarakat dan mendorong budaya transparansi informasi.

Perubahan demokrasi Indonesia di masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan DPR beradaptasi dengan dinamika sosial-politik yang dibawa oleh generasi Z. DPR yang mampu menyerap aspirasi dari masyarakat digital dengan cara yang terbuka akan lebih sukses dalam mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Generasi Z dan DPR sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk bekerja sama dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Generasi Z membawa energi baru, gagasan kritis, dan kemampuan digital, sementara DPR memiliki kewenangan formal untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Bila keduanya mampu berkolaborasi, pelaksanaan kedaulatan rakyat akan menjadi lebih nyata dan demokrasi akan berkembang menjadi lebih inklusif. Namun tantangan seperti rendahnya literasi politik, tingginya penyebaran informasi palsu, serta sikap skeptis sebagian anak muda terhadap institusi politik harus tetap diperhatikan. Oleh sebab itu, dengan membuka forum digital, menghadirkan mekanisme aspirasi publik yang lebih mudah dijangkau, serta menampilkan proses kerja yang transparan, DPR dapat membangun kepercayaan baru di kalangan anak muda. Upaya ini akan membantu menghilangkan kesan bahwa DPR jauh dari kepentingan rakyat.

Masa depan demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan DPR untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan pola partisipasi generasi Z. Ketika DPR mampu mengadopsi teknologi digital, membangun komunikasi yang lebih terbuka, serta menghargai aspirasi generasi muda, maka kepercayaan publik dapat meningkat dan sistem politik akan berjalan lebih efektif. Generasi Z bukan hanya bagian dari rakyat yang perlu diwakili, tetapi merupakan kekuatan penting yang dapat mendorong terciptanya demokrasi yang lebih relevan, modern, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Depdikbud, 2019), hlm. 54.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 77.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan Survei Nasional Literasi Digital Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo Press.
- Laporan Kominfo, *Survei Partisipasi Digital Generasi Muda Indonesia 2023*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023), hlm. 12.
- Lembaga Survei Indonesia, *Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara 2023*, Jakarta: LSI Press, 2023.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 123.
- Prananta, A., & Hidayat, F. (2022). "Karakteristik Generasi Z dan Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia." *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 2.
- Pusat Kajian Kepemudaan Universitas Indonesia (PKK UI). (2022). *Generasi Z dan Partisipasi Politik*

Digital di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).